

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana pemerintah dan swasta mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (Badrudin, 2012:113).

Tujuan pembangunan ekonomi adalah memperluas kesempatan kerja dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengarahkan pembagian pendapatan secara merata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Masalah utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah kesempatan kerja. Masalah tenaga kerja adalah masalah yang besar dan kompleks. Untuk menggambarkan masalah tenaga kerja dimasa yang akan datang tidaklah mudah karena disamping mendasarkan pada angka tenaga kerja di masa lampau, harus juga diketahui prospek produksi di masa mendatang. Persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja adalah kondisi kerja yang baik, upah yang layak, kualitas output yang tinggi, serta kualitas sumber daya manusia, disamping masalah hubungan industri antara pekerja dengan dunia usaha (Maimun, 2007).

Pertumbuhan suatu wilayah yang melonjak diiringi dengan penambahan angkatan kerja banyak menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks.

Permasalahan ini disebabkan karena belum berfungsinya semua sektor kehidupan masyarakat dengan baik serta belum meratanya pembangunan disegala bidang, sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat.

Adanya berbagai macam sektor belum mampu menyerap dan memenuhi angkatan kerja yang terus meningkat secara maksimal yang disebabkan karena adanya ketimpangan antara lapangan kerja yang tersedia dan pertumbuhan angkatan kerja yang tumbuh dengan cepat. Penyerapan tenaga kerja akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi khususnya pada sektor industri. Sektor industri manufaktur mempunyai peranan penting karena dapat dilihat mampu menyerap sebagian besar jumlah penduduknya.

Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di Provinsi Maluku tidak seimbang dengan penambahan jumlah angkatan kerja sehingga sangat berdampak pada tingginya jumlah pengangguran. Pada dasarnya tingginya angka pengangguran akan sangat berdampak pada pembangunan ekonomi yang memiliki kebijaksanaan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Maluku. Dalam pelaksanaan pembangunan Kebijakan perluasan kesempatan kerja merupakan hal penting karena salah satu tolak ukur untuk menilai bagaimana keberhasilan ekonomi suatu wilayah adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh adanya pembangun ekonomi (Rejekiingsi, 2007). Tidak terkecuali di Provinsi Maluku, pengangguran menjadi masalah yang sulit terselesaikan, ini dapat dilihat dari jumlah

pengangguran yang mengalami fluktuasi, yang menandai bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan yang belum optimal.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Maluku 2013-2017 (Jiwa).

Tahun	Jumlah Penduduk	Angkatan Kerja
2013	1.628.413	663.481
2014	1.657.409	672.304
2015	1.686.469	711.056
2016	1.715.548	733.337
2017	1.744.654	769.108

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku dalam angka 2018

Tabel 1.1 Menjelaskan bahwa jumlah penduduk Provinsi Maluku disetiap tahunnya meningkat sampai tahun 2017 sebesar 1.744.654 jiwa. seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang kian meningkat, jumlah angkatan kerja juga mengalami peningkatan. Jumlah angkatan kerja yang mengalami peningkatan tersebut nyatanya tidak sepadan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja.

Strategi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja adalah melalui pembangunan di sektor industri, proses industrialisasi dan pembangunan industri merupakan salah satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti tingkat hidup yang baik dan taraf hidup yang lebih bermutu. Sektor industri mempunyai peran sebagai sektor unggulan (*leading sector*), artinya dengan adanya pembangunan sektor industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa yang menyebabkan meluasnya peluang kerja (Arsyad, 2010).

Dengan adanya pembangunan industri maka diharapkan akan dapat memicu sektor lainnya seperti pertanian dan sektor jasa. Keadaan tersebut mendorong adanya perluasan peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Sektor industri merupakan penompang utama perkembangan industri di sebuah negara yang berperan penting dalam perekonomian. Perkembangan ini dapat dilihat dari aspek kualitas produk yang dihasilkannya maupun kinerja industri secara keseluruhan. Hal ini ditandai dengan kontribusi yang sejak tahun 1991 menempati peringkat pertama dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) (Dalglish et al., 2007).

Sektor industri dibedakan menjadi industri sedang dan besar serta industri kecil dan rumah tangga. Banyaknya angkatan kerja yang diserap dalam suatu sektor, menggambarkan kemampuan sektor tersebut dalam hal Penyerapan tenaga kerja. Di provinsi Maluku, sektor industri sedang dan besar dalam hal Penyerapan tenaga kerja lebih kecil jika dibandingkan dengan industri kecil dan rumah tangga.

Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Sedang/Besar dan Sektor Industri Kecil tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Industri Sedang/Besar	Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil
2013	3.854	117.780
2014	4.396	126.640
2015	3.635	152.410
2016	3.690	188.307
2017	3.840	221.464

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2018

Tabel 1.2 Menjelaskan bahwa, penyerapan tenaga kerja di sektor industri sedang dan besar mengalami fluktuasi. Penyerapan tenaga kerja yang paling besar diserap oleh sektor industri kecil dan rumah tangga, seperti pada tahun 2017 tenaga kerja di perusahaan kecil dan rumah tangga tenaga kerja yang terserap mencapai 221.464 jiwa. Sedangkan, pada perusahaan industri sedang dan besar sebesar 3.840 jiwa. Hal ini membuktikan bahwa industri sedang dan besar belum mampu dalam penyerapan tenaga kerja. Untuk itu perlu adanya usaha-usaha yang dilakukan agar dapat mempengaruhi peningkatan permintaan tenaga kerja.

Usaha memperluas kegiatan industri untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah unit usaha dan tingkat upah. Secara umum, pertumbuhan unit usaha

suatu sektor dalam hal industri sedang dan besar pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan.

Menurut Rejekiingsih (2004) Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah tenaga kerja. Artinya, jika jumlah unit usaha bertambah maka bertambah pula jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh unit usaha yang bersangkutan juga akan bertambah. Hal ini berarti, permintaan tenaga kerja juga bertambah. Selain itu tingkat upah juga memiliki pengaruh terhadap kesempatan kerja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bakar (2013) menggunakan variabel upah mengenai peran industri mikro dan kecil dalam penyerapan tenaga kerja di provinsi aceh, menemukan bahwa tingkat upah berpengaruh positif terhadap permintaan tenaga kerja. Ketika upah meningkat 1% maka akan menaikkan permintaan tenaga kerja sebesar 0,069%. Peningkatan upah ini ditandai dengan meningkatnya konsumsi para pekerja sehingga terjadi kenaikan permintaan barang dan jasa perusahaan meningkat, pada akhirnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga meningkat. Hal ini ditunjukkan pada kenaikan jumlah output sebesar 1% akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebesar 0,184%.

Kenaikan upah memang dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja melalui peningkatan output, tetapi ada beberapa kasus kenaikan upah justru berdampak negatif terhadap Penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Menurut Afrida (2003) kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah karena adanya perubahan permintaan hasil produksi, asumsinya jika upah naik maka akan mempengaruhi harga barang yang

mengakibatkan rendahnya permintaan akan barang tersebut pada akhirnya berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena menurunnya hasil produksi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati (2012) bahwa upah minimum berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien jalur yang berada negatif bermakna bahwa pengaruh upah terhadap Penyerapan tenaga kerja adalah tidak searah, artinya apabila terjadi kenaikan upah maka berpotensi untuk menurunkan Penyerapan tenaga kerja.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana jumlah unit usaha dan jumlah upah penyerapan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur sedang dan besar tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2012-2017?
2. Bagaimana pengaruh jumlah unit usaha dan jumlah upah terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur sedang dan besar pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2012-2017?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah berfungsi untuk memfokuskan agar penelitian ini tidak terlalu luas pembahasannya, variabel yang akan diteliti serta bagaimana pengaruh variabel tersebut dengan variabel yang lain, maka peneliti membatasi permasalahan yang diangkat hanya pada variabel jumlah Penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur sedang dan besar pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan jumlah unit usaha dan jumlah upah penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur sedang dan besar tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2012-2017.
2. Menganalisis pengaruh variabel jumlah unit usaha dan jumlah upah terhadap Penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur sedang dan besar pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2012-2017.

E. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan untuk referensi perbandingan objek penelitian yang sama khususnya tentang pengaruh nilai output, jumlah unit usaha dan jumlah upah terhadap penyerapan tenaga kerja disektor industri sedarrrrrng dan besar.

b. Secara Praktis

Bagi pemerintah, diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemerintah setempat dalam membuat dan menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, permintaan tenaga kerja, dan fungsi dari penyerapan tenaga kerja.

